

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, M. R. (2014). *Hukum Telematika*. Tangerang Selatan: Jaya Abadi Utama.
- Alfitra, S.H., M.H. (2012). *Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan Pidana*. Depok: Raih Asia Sukses.
- Arief, B. N. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arto, M. (2007). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asyadie, Z., & Rahman, A. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Y. P. (2021). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryadi, D. (2013). *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*. Yogyakarta: Lima.
- Makara, M. T. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marpaung, L. (2009). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maruli, S. (2020). *Cyber Law*. Bandung: Cakra.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, L. (2007). *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek peradilan*. Bandung: Mandar Maju.

- Prasetyo, Teguh. (2016). *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjohamidjojo, M. (1997). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*. Jakarta; Pradnya Paramita.
- Rifai, A. (2011). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riswandi, B. A. (2006). *Hukum Cyberspace*. Yogyakarta: Gita Nagari
- Soeparmono. (2005). *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.
- Suhariyanto, B. (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Supramono, G. (2012). *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama.
- Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas Ne bis in idem.

C. Jurnal

Andrew & R. Rahaditya. (2023). "Implementasi Asas Ne Bis In Idem dalam Putusan Hakim yang Berkekuatan Hukum Tetap pada Perkara Pidana", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1.

Indah, N. R., Hamid, A., & Zubaidah, S. (2021): Penyidikan Tindak Pidana Skimming Dalam Transaksi Elektronik Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Jurnal of Law*, Vol. 19, No. 3.

Kusuma, M. J. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Menjadi Korban Kejahatan di Bidang Perbankan. *Al' Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 9. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v5i9.188>

Maulidya, G. Z., Rahmawati, S. N., Rahmawati, V., & Mardany, A. F. (2023). Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>

Natalia, C. D., Dewi, A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Sanksi Pidana terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindakan Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan Teknik *Skimming*. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2. DOI: <http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2340.37-41>

Nugroho, N. (2017). “Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat di Indonesia”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14, No. 1.

Pratiwi, D. F. (2019). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Skimming. *Jurisdiction*, Vol. 2, No. 4. DOI: <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14488>

Sorongon, T. T. (2016). Eksepsi dalam Kuahap dan Praktek Peradilan. *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 4.

D. Lain-Lain

Nugraha, H. F. (2018). *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindakan Terhadap Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Dengan Menggunakan Teknik Skimming Dihubungkan Dengan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).